

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori yang menjadi dasar dari pokok permasalahan yang diamati. Teori yang dibahas dalam bab ini terdiri dari pengertian pembangunan, pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi dan hubungan antara ketimpangan.

2.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas. Menurut akademisi ilmu ekonomi, secara tradisional pembangunan dipandang sebagai suatu fenomena ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perspektif mengenai tujuan dan makna pembangunan kemudian berkembang menjadi lebih luas lagi. Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, indikator pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDRB maupun PDRB perkapita tetapi juga indikator lainnya seperti: ketenagakerjaan, pendidikan, distribusi pendapatan, jumlah penduduk miskin. Hal ini sesuai dengan paradigma pembangunan modern yang mulai mengedepankan pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, serta penurunan tingkat pengangguran (Todaro dan Smith, 2006:103).

Menurut Rostow pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyebabkan perubahan karakteristik penting suatu masyarakat, misalnya perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Rostow membedakan proses pembangunan menjadi lima tahap yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi. (Arsyad, 1999: 117).

Jhinghan (2010) mengajukan beberapa persyaratan pembangunan ekonomi yaitu:

- 1) Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri/daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari masyarakatnya.
- 2) Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan.
- 3) Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri yang ditandai oleh meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya sektor primer.
- 4) Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi, bahkan disebut sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi.

- 5) Kriteria investasi yang tepat, memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian.
- 6) Persyaratan sosio-budaya. Wawasan sosio budaya serta organisasinya harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan.
- 7) Administrasi. Dibutuhkan alat perlengkapan administratif untuk perencanaan ekonomi dan pembangunan.

2.1.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Arsyad (1997) mengartikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dengan wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Arsyad, 1997:165).

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Dalam

pembangunan ekonomi daerah diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata (Arsyad, 1997:167).

Keadaan sosial ekonomi yang berbeda di setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dan situasi alamiah yang ada, letak geografis, dan sebagainya. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan, akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut seperti yang diungkapkan Myrdal dalam Jhingan (1993) mengenai dampak balik pada suatu daerah. Oleh karena itu, apabila proses perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar akan membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi daerah-daerah yang terbelakang maupun daerah-daerah maju dan pada akhirnya justru dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan.

2.2 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai makna yang berbeda. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses

yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh sistem kelembagaan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *gross domestic product* (GDP) / *gross national product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan, atau apakah pertumbuhan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999 : 147).

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kenaikan *output* per kapita, yaitu sisi *output* totalnya (*gross domestic product* / GDP) dan jumlah penduduknya. Output per kapita ialah *output* total dibagi dengan jumlah penduduk. Proses kenaikan *output* per kapita dianalisis dengan cara melihat apa yang terjadi dengan *output* total di suatu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak. Menurut pandangan para ahli ekonomi klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill), maupun pandangan ekonomi neo-klasik (Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (Suryana, 2000 : 53-57). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang telah dicapai pada masa sebelumnya.

Proses pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh suatu kombinasi yang kompleks dari sejumlah faktor ekonomi, sosial termasuk pendidikan dan keterampilan, demografi, geografi, politik, kebijakan ekonomi, dan faktor lainnya. Di dalam teori pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju

pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah bisa dikelompokkan menjadi faktor dari sisi penawaran, seperti kemajuan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, penemuan material baru, dan dari sisi permintaan, seperti peningkatan pendapatan dan perubahan selera konsumen.

2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Berikut ini akan dijelaskan mengenai teori umum pertumbuhan ekonomi dari aliran klasik dan neo-klasik. Teori dari beberapa ahli ekonomi ini pada dasarnya untuk menciptakan tingkat kesejahteraan hidup dan pemenuhan kebutuhan hidup dengan sumber daya terbatas yang ada di bumi ini.

2.2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Adam Smith dalam bukunya "*An Inquiry into the nature and Causes of Wealth of the Nation*" mengemukakan faktor-faktor yang menimbulkan pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Jadi menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpacuan antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000 : 53).

Adam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain :

a. Pertumbuhan output total

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Adam Smith ada tiga, yaitu :

1. Sumber daya alam yang terjadi (faktor produksi tanah)

Menurut Adam Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu negara. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan *output*. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

2. Sumber daya insane (jumlah penduduk)

Sumber daya insane mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan *output*. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.

3. Stok barang modal

Stok modal merupakan unsur produktif yang secara aktif menentukan pertumbuhan *output*. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan *output*. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung

pada laju pertumbuhan stok modal (sampai batas maksimal dari sumber daya alam).

b. Pertumbuhan Penduduk

Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan menikah pada usia muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran akan meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat subsisten maka jumlah penduduk akan menurun.

Tingkat upah yang berlaku menurut Adam Smith ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja tumbuh lebih cepat dari pada penawaran tenaga kerja (Suryana, 2000 : 61-62)

2.2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan (Arsyad, 1999 : 61).

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut teori neo-klasik, faktor-faktor produksi

yang dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan *output* adalah jumlah tenaga kerja dan *capital* (modal). Modal bisa dalam bentuk *finance* atau barang modal. Penambahan jumlah tenaga kerja dan modal dengan faktor-faktor produksi lain, misalnya tingkat produktivitas dari masing-masing faktor produksi tersebut atau secara keseluruhan tetap akan menambah *output* yang dihasilkan. Presentase pertumbuhan output bisa lebih besar (*increasing return to scale*), sama (*constant return to scale*), atau lebih kecil (*decreasing return to scale*) dibandingkan presentase pertumbuhan jumlah dari kedua faktor produksi tersebut (Tambunan, 2001 : 7).

Model pertumbuhan yang didasarkan pada model pertumbuhan neo-klasik ini memiliki kelemahan. Model tersebut tidak bisa menjelaskan mengapa di banyak negara di dunia pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada yang diperkirakan dalam model ini. Hal ini bisa terjadi, karena modal pertumbuhan neo-klasik hanya melihat pada satu sumber saja, yaitu kontribusi dari peningkatan jumlah faktor-faktor produksi. Dengan demikian, banyak faktor produksi lain yang tidak dimasukkan ke dalam model tersebut, ternyata sangat menentukan laju pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Salah satunya yang paling penting adalah teknologi. Dalam model di atas faktor teknologi dianggap konstan sehingga tidak dimasukkan ke dalam model (Tambunan, 2001 : 9).

2.3 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya

disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah (Sjafrizal, 2008 : 104).

Faktor-faktor penyebab ketimpangan

a. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tindakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

b. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah.

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal antar kabupaten/kota juga merupakan terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah.

c. Perbedaan sumber daya alam antar kabupaten/kota

Dasar pemikiran klasik sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibanding daerah yang miskin sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih dibenarkan. Dalam arti sumber daya alam harus dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan, yang selanjutnya harus dikembangkan terus. Untuk tercapainya tujuan ini diperlukan faktor-faktor lain yaitu teknologi dan sumber daya manusia.

d. Perbedaan kondisi demografis antar wilayah.

Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/kota juga disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis antar Kabupaten/kota, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja.

2.4 Hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi

Pada umumnya untuk mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, perlu diketahui tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan nasional akan menentukan besarnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sering dijadikan patokan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Besarnya pendapatan per kapita sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, sehingga apabila pertambahan pendapatan nasional lebih besar daripada tingkat pertambahan penduduk, maka tingkat pendapatan per kapita penduduk meningkat. Apabila tingkat pertambahan pendapatan nasional lebih kecil dari pertambahan penduduk, maka pendapatan per kapita akan turun. Usaha untuk mempertahankan tingkat pendapatan per kapita atau tingkat kesejahteraan relatif, perlu dicapai tingkat pertambahan pendapatan nasional yang sama dengan tingkat pertambahan penduduk (Kuncoro, 2004 : 129).

Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita itu sendiri akan naik apabila produktivitas per kapita mengalami kenaikan. Untuk menaikkan produktivitas per kapita berarti perlu adanya perubahan struktur ekonomi, struktur produksi,

teknik produksi, serta masyarakat yang statis berkembang menjadi masyarakat dinamis. Jadi untuk mengetahui laju pembangunan tidak cukup dengan melihat dari segi pendapatan per kapita saja, tetapi harus pula diikuti dengan perubahan dalam struktur ekonomi dan masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi baru dikatakan ada kemajuan apabila pendapatan nasional atau pendapatan per kapita naik dengan diikuti perubahan struktur ekonomi, teknik produksi, adanya modernisasi, dan masyarakat tradisional berkembang menjadi masyarakat dinamis yang berfikir rasional secara ekonomi dari tindakan-tindakannya (Hasibuan, 1987 : 40-41).

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertimbangan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Sektor yang layak dijadikan sebagai andalan pembangunan nasional ialah sektor yang dampak pertumbuhannya terdapat penurunan jumlah penduduk miskin relatif lebih tinggi daripada sektor-sektor lainnya (Kuncoro, 2004 : 135).

Hubungan antar tingkat ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan hipotesis Kuznets. Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang pada umumnya meningkat pada tingkat ketimpangan pendapatan rendah hingga sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu, dan selanjutnya menurun. Pemikiran tentang mekanisme yang terjadi pada fenomena Kuznets bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga

kerja dengan produktivitas rendah (dan tingkat kesenjangan pendapatan rendah) ke sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (dan tingkat kesenjangan menengah). Dengan adanya ketimpangan antar sektor maka secara substansial akan menaikkan kesenjangan di antara tenaga kerja pada masing-masing sektor (Kuncoro, 2004 : 137).

Pembangunan di dalam lingkungan daerah secara spasial tidak terlalu merata. Ketimpangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan bertujuan untuk penghapusan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja produktif, dan peningkatan *gross national product* (GNP) kelompok miskin. Strategi ini dapat dilakukan dengan redistribusi kekayaan harta produktif melalui kebijakan fiskal dan kredit, pemanfaatan fasilitas-fasilitas ekonomi, reorientasi produk melalui proyek padat karya dan realokasi sumber daya produktif yang menguntungkan golongan miskin melalui pengalihan investasi dari konsumsi serta penekanan sektor tradisional dan informasi di perkotaan (Suryana, 2000 : 55-59).

2.5 Konsep Konvergensi

Dalam konsep pertumbuhan ekonomi, konvergensi pertumbuhan adalah kecenderungan perekonomian-perekonomian miskin tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian-perekonomian kaya, dengan demikian diharapkan perekonomian daerah miskin dapat mengejar ketertinggalannya dan ketimpangan perekonomian antar daerah dapat menurun (Sukirno, 1985 : 31). Konvergensi terjadi ketika perekonomian miskin cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan

perekonomian kaya. Properti ini dihubungkan dengan konsep β -convergence yang diperoleh dari analisa regresi antar perekonomian. Konsep konvergensi adalah β -convergence yang terdiri dari konvergensi absolut dan bersyarat serta α -convergence.

Terjadinya proses konvergensi di mana daerah miskin cenderung tumbuh lebih cepat tidak serta merta menyebabkan menurunnya disparitas pendapatan regional per kapita. Artinya β -convergence tidak selalu identik dengan α -convergence. Meskipun tidak identik tetapi secara empiris β -convergence akan terverifikasi ketika α convergence juga terverifikasi sehingga dalam prakteknya kedua konsep di atas dapat dilaksanakan bergantian. α -convergence akan terjadi antar beberapa negara ketika negara-negara tersebut mempunyai dispersi pendapatan per kapita yang cenderung menurun lebih cepat.

Studi empiris tentang konvergensi antar daerah dan antar Negara umumnya terfokus pada ukuran utama konvergensi yaitu konvergensi beta (β -convergence) dan (α -convergence). Satu kelebihan utama dari β -convergence adalah analisa bersifat dinamis. Bila pengamatan jangka pendek tidak mampu memberi jawaban tentang dampak dari kebijakan publik, maka kita tidak dapat melihat bahwa dampak tersebut dalam kecenderungan jangka panjang. Dari sudut pandang teoritis, analisa β -convergence hanyalah analisa deskriptif dan sama sekali tidak berbicara tentang mekanisme di balik bekerjanya konvergensi tersebut walaupun demikian analisisnya berupa tes langsung terhadap hipotesis teori pertumbuhan neoklasik dengan asumsi *diminishing return of capital*.

2.6 Studi Terkait

Penelitian mengenai ketimpangan wilayah mulai banyak dilakukan sejak tahun 1970-an, kemudian diikuti oleh penelitian-penelitian dalam negeri mengenai ketimpangan wilayah. Adifa (2007) melakukan penelitian tahun 2005 hingga 2006 tentang Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Pembangunan di Kabupaten Alor menggunakan indeks Williamson sebagai salah satu analisis untuk mendeteksi ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Alor. Dari indeks Williamson tersebut memberikan indikasi bahwa ketimpangan pendapatan pada kurun waktu 1999- 2004 menunjukkan bahwa rata-rata ketimpangan pendapatan tingkat Kabupaten jauh lebih tinggi dari pada rata-rata ketimpangan pendapatan antar ketiga Satuan Wilayah Pengembangan. Sedangkan ukuran ketimpangan perkembangan wilayah lain juga dilihat dengan penggunaan Indeks Skalogram yang dicirikan oleh ketersediaan penyediaan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di desa-desa antar satuan wilayah pengembangan sehingga dari hasil analisis ini diperoleh kesimpulan bahwa kota-kota hirarki yang ditetapkan berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Alor Tahun 1991 antar SWP hingga tahun 2003 menunjukkan perkembangan yang tidak signifikan, bahkan pada beberapa hirarki yang berperan sebagai pusat aktivitas Kecamatan menunjukkan indeks perkembangan yang kurang bahkan sangat kurang. Sedangkan untuk melihat ketimpangan proporsi Alokasi APBD Pembangunan antar SWP digunakanlah model indeks entropy yaitu dengan melihat perkembangan wilayah dari sisi investasi, sedangkan untuk melihat mobilitas dan sinergitas interaksi spasial antar wilayah maka menggunakan analisis Interaksi Spasial Antar Hirarki/Pusat Aktivitas Wilayah Pembangunan. Serta penelitian ini

juga menggunakan analisis sektor basis/komoditi Unggulan seperti *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share Analysis* (SSA) untuk melihat potensi wilayah dan komoditi unggulan di setiap wilayah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hastoto (2003), mengenai Disparitas Pembangunan Regional di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Ketimpangan diukur dengan menghitung Indeks entropi relatif untuk provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, membandingkan antara kedua provinsi ini maka diperoleh hasil bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara lebih tinggi atau lebih buruk dibandingkan di Provinsi Gorontalo, hasil ini diperoleh dengan menggunakan PDRB dan PDRB per kapita. Selain penggunaan indikator –indikator tersebut juga digunakan indikator lain seperti IPM, IKM, IDG. Interaksi Spasial dipakai dengan mengukur hubungan/ interaksi kedua daerah tersebut. Serta menggunakan LQ dan SSA untuk melihat potensi wilayah dan komoditi unggulan, agar pola kebijakan yang diambil tidak terlepas dari tujuan pembangunan yaitu menciptakan pemerataan dengan mengetahui ketimpangan yang terjadi serta pembangunan sesuai kapasitas dan kemampuan daerah tersebut, dan juga terlihat dari pola interaksi yang saling menguntungkan yang saling memperkuat.

Penelitian oleh Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2000) mengenai Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas, 1993-2000. Hasil dari penelitian ini di antaranya: (1). Berdasarkan tipologi Klassen, daerah/kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita menjadi empat kelompok yaitu daerah/kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh, kecamatan yang maju tapi tertekan,

kecamatan/daerah yang berkembang cepat dan kecamatan/daerah tertinggal. (2). Pada periode pengamatan 1993–2000 terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan, baik dianalisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks entropi Theil. Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial. (3). Hipotesis Kuznets mengenai ketimpangan yang berbentuk kurva U terbalik berlaku di Kabupaten Banyumas, ini terbukti dari hasil analisis trend dan korelasi Pearson. Hubungan antara pertumbuhan dengan indeks ketimpangan Williamson dan entropi Theil untuk kasus Kabupaten Banyumas selama periode 1993-2000 terbukti berlaku hipotesis Kuznets.

Penelitian oleh Aulia Fabia menggunakan data cross section PDRB perkapita atas harga dasar berlaku, jumlah penduduk dan tingkat pendidikan yang dilihat dari jumlah murid SMU di seluruh kabupaten/kota di pulau Sumatera. Tahun yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tahun 1995, tahun 2001, dan tahun 2004. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda dengan PDRB perkapita tahun analisis sebagai variabel dependen dan PDRB perkapita tahun dasar dan tingkat pendidikan sebagai variabel independen. Diduga terjadi konvergensi pendapatan yang relatif tinggi antar kabupaten/kota di pulau Sumatera dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan konvergensi pendapatan antar kabupaten/kota di pulau Sumatera. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode analisis, pendapatan antar kabupaten/kota di pulau Sumatera cenderung konvergen. Hal ini dapat kita lihat dari nilai koefisien regresi pada tahun-tahun yang dianalisis nilainya lebih kecil dari nol. Hasil uji menunjukkan dampak otonomi daerah berpengaruh

positif terhadap peningkatan konvergensi pendapatan dan menurunnya ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di pulau Sumatera. PDRB perkapita tahun dasar signifikan mempengaruhi PDRB perkapita tahun analisis sedangkan tingkat pendidikan tidak signifikan mempengaruhi PDRB perkapita tahun analisis, hal ini menunjukkan variabel tingkat pendidikan kurang mempengaruhi peningkatan konvergensi pada konvergensi bersyarat.

